

# 2024

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

### SEKRETARIAT

#### PPID Kota Banjarbaru

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika  
Jl. Pangeran Suriansyah No.5  
Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara  
Banjarbaru - Kalsel  
Telp. (0511) 5200052  
Email : [ppid@banjarbarukota.go.id](mailto:ppid@banjarbarukota.go.id)



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai pusat informasi bagi masyarakat, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Laporan ini memuat berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan peluang dalam pengelolaan informasi, khususnya dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan akurat. Melalui inovasi digital dan sinergi antar instansi, Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya menghadirkan layanan yang responsif serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya tim PPID Kota Banjarbaru yang bekerja keras dalam memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi di masa mendatang serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Kota Banjarbaru yang lebih maju dan transparan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja layanan informasi dan dokumentasi di Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Februari 2025  
PPID Kota Banjarbaru

Asep Saputra, S.Kom, MM

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Gambaran Kebijakan Umum Pelayanan Informasi Publik .....	1
Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik .....	4
Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	7
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	10
Capaian PPID Tahun 2024 .....	11
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	17
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	18

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

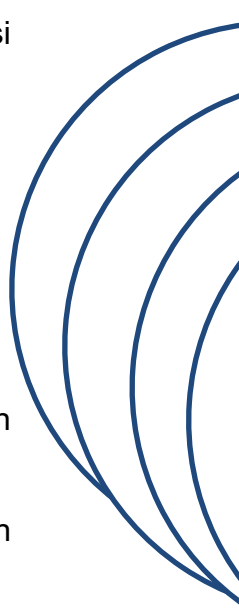
---

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu bagian dalam upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang masuk dalam area perubahan Penataan Tatalaksana. Penataan Tatalaksana sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja, baik pada level kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

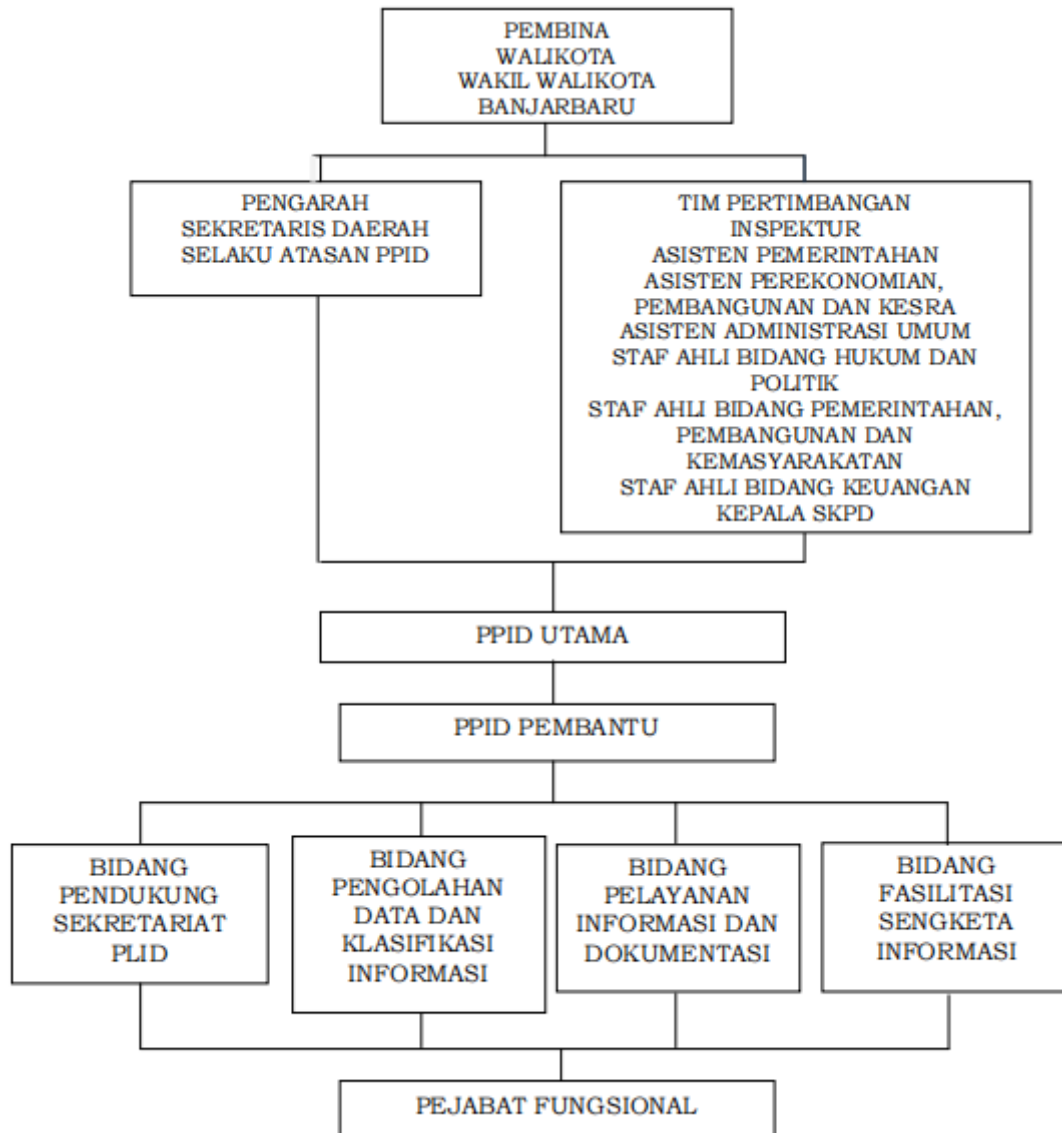
Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Kota Peduli HAM, khususnya dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi, maka pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi harus terus ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/52/KUM/2023 telah menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan 6 komponen utama dalam susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru, yaitu :

- 
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
  2. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, terdiri dari :
    - a. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
  3. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, terdiri dari :
    - a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
    - b. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
    - c. Pejabat fungsional arsiparis dan pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
    - d. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
  4. Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru
  5. Pendukung Sekretariat PLID, terdiri dari JFT Pranata Komputer dan JFT Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta JFT Pranata Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarbaru.
  6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pelaksana terdiri dari :
    - a. Kepala Bagian pada Setdako
    - b. Kepala Bagian Umum dan Anggaran pada Sekretariat DPRD
    - c. Sekretaris pada Badan/Kantor/Dinas/Kecamatan/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
    - d. Kepala Bagian TU pada RSDI Banjarbaru
    - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Adanya penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat mempercepat terwujudnya akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dengan lebih mudah. Dari sisi badan publik juga dapat termotivasi untuk bertanggung jawab, sehingga terwujudnya tata pemerintahan yang baik dapat segera terwujud.



Struktur PPID Kota Banjarbaru

# Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

## A. Sekretariat PLID

PLID Kota Banjarbaru beralamat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru. Jl.Pangeran Suriansyah No.5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru; Telp/Fax:0511-6749126;

E-mail : [ppid@banjarbarukota.go.id](mailto:ppid@banjarbarukota.go.id).

## B. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)



Untuk efektivitas pelayanan, ruang dan SDM, maka layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi satu dengan pelayanan front office. Adapun sarana dan prasana yang tersedia di ruang ini adalah :

1. 1 set meja front office dan kursi petugas
2. 1 unit PC untuk petugas front desk



3. 1 mesin Printer
4. 1 line Telepon/Fax
5. 2 unit AC
6. 1 set kursi ruang tamu
7. Leaflet tentang PLID
8. ATK
9. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  - a. Formulir permintaan informasi publik,
  - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
  - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
  - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
  - e. Formulir pengajuan keberatan.

### **C. Jam Pelayanan Informasi Publik**

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d Jum'at).

Senin - Kamis : 09.00 – 15.00 WITA

Istirahat : 12.00 – 13.00 WITA

Jum'at : 09.00 – 11.00 WITA

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui surat, email atau fax, dan aplikasi SIP-PPID..

### **D. Sumber Daya Manusia**

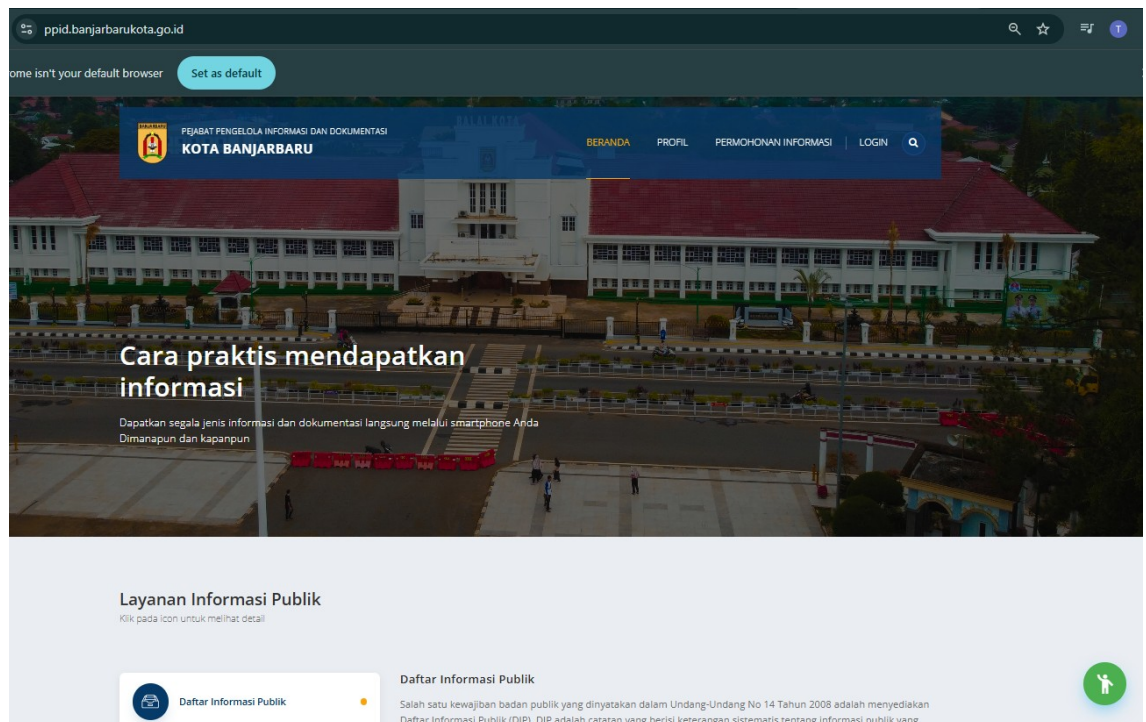
Pelayanan informasi publik di PPID Kota Banjarbaru, terdiri dari 2 orang petugas front office yang juga merangkap sebagai petugas pelayanan pada Diskominfo, serta 4 orang petugas back office yang ada pada seksi pelayanan informasi.

### **E. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pelayanan Permintaan Informasi Publik sebesar 44.079.000,-



## F. Penyediaan Informasi Melalui Website



Aplikasi yang digunakan oleh PPID Kota Banjarbaru adalah SIP-PPID yang merupakan aplikasi milik Kemendagri. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website <https://ppid.banjarbarukota.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2021.

# Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2024, permintaan Informasi Publik melalui aplikasi SIP-PPID sebanyak 0 permohonan, 10 permohonan diajukan melalui PPID, dan 320 permohonan diajukan langsung ke PPID Pelaksana, sehingga total permintaan informasi di tahun 2024 adalah 330 permohonan, dengan rincian sbb :

No	Permintaan Informasi	Jumlah
1.	Melalui Aplikasi SIP-PPID	0 permohonan
2.	Melalui PPID	10 permohonan
2	Melalui PPID Pelaksana	320 permohonan
Total Permohonan		330 permohonan

Tahun ini, tidak ada permohonan yang diterima melalui Aplikasi SIP-PPID. Sedangkan permohonan yang diterima secara langsung oleh PPID ada 10, yaitu :

No	Tanggal	Pemohon	Informasi yang diminta
1	22-1-2024	Amanda Cahaya Kencana	Rekaman CCTV Simpang 3 Mistar Cokrokusumo Arah Trikora
2	4-3-2024	M. Syarif Abdurrahman	Rekaman CCTV Simpang 4
3	5-3-2024	Aulia Rahman	Rekaman CCTV
4	13-3-2024	Rasyidi	Rekaman CCTV
5	11-3-2024	Ana Lestari	Rekaman CCTV bundaran Aeris Hotel
6	1-7-2024	Khairil Azwar	Rekaman CCTV Rebatic
7	17-7-2024	Ahmad Budiyanto	Rekaman CCTV
8	30-7-2024	Ayu Fitriani	Rekaman CCTV
9	8-8-2024	Maulana Adma	Rekaman CCTV

		Reznansyah	
10	19-12-2024	Farah Aulia Febrya	Perkembangan kinerja makro tahun 2020 sampai 2024 (angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi terutama pada UMKM, angka kemiskinan, tingkat pertumbuhan penduduk di Banjarbaru)

Sebagian besar PPID Pelaksana melaporkan NIHIL untuk jumlah permohonan yang diterima. Hanya terdapat 10 unit kerja yang menerima permohonan informasi. Rincian jumlah permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut :

Permohonan		Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan permohonan ditolak		
Unit kerja	Jumlah		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/ belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Dinas Perumahan dan Permukiman	40	5 hari	40					
DPMPTSP	25	2 hari	19	5				
BKPSDM	72	1 hari	72					
Kelurahan Loktabat Selatan	5	1 hari	5					
Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	2	3 hari	2					
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	143	5 hari	143					
Kelurahan Sungai Besar	2	1 hari	2					
Kecamatan Liang Anggang	1	3 hari	1					
Kelurahan Sungai Ulin	14	1 hari	14					
Prokopim	16	1 hari	16					

**Jumlah permohonan informasi yang diterima = 320 permohonan**

**Jumlah permohonan yang dikabulkan = 320 permohonan (sepenuhnya : 315, sebagian : 5)**

**Jumlah permohonan yang ditolak = 0 permohonan**

**Jumlah permohonan yang tidak ditanggapi = 0 permohonan**

**Waktu rata-rata pelayanan = 2,3 hari kerja**

# Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak ada sengketa informasi yang dilaporkan pemohon

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Permohonan Informasi
				NIHIL				

# Capaian PPID Tahun 2024

Beberapa capaian yang diperoleh oleh PPID Kota Banjarbaru di tahun 2024 adalah :

1. Adanya admin aplikasi SIP-PPID tahun 2024 pada semua PPID Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188.4/096/SETDA/2024 tentang Tim Pengelola Dan Petugas Admin Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024
2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada para admin SKPD se-Kota Banjarbaru, di Ruang Pelatihan TIK Diskominfo Kota Banjarbaru, yang dilaksanakan selama 3 hari (6-8 Mei 2024).



3. Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di Aula di Aula Gawi Sabrataan Pemko Banjarbaru pada 20 November 2024 dengan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.





4. Terlaksananya Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pemaparan Keamanan Kerahasiaan Informasi dan Data Pribadi Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada 9 Desember 2023 di Studio Mini Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.





5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan dari moneyv tersebut Kota Banjarbaru masuk dalam kategori daerah cukup informatif



6. Terunggahnya Informasi Publik dari unit kerja melalui <https://ppid.banjarbarukota.go.id>.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**KOTA BANJARBARU**

BERANDA PROFIL LOGIN

Home / Dokumen

Pencarian

Judul

Kategori

Jenis

Komponen

CARI DOKUMEN RESET

Statistik

Berkala	674
Serta Merta	29
Setiap Saat	149
Total Informasi Publik	852

### Daftar Informasi Publik

PERMOHONAN INFORMASI

No.	Judul Dokumen Informasi	Tampilkan
1	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) Kelurahan Palam 27 December 2018   Berkala   Laporan Keuangan	Lihat
2	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 Kelurahan Palam 27 December 2018   Berkala   Laporan Keuangan	Lihat
3	STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR TAHUN 2018 Kelurahan Landasan Ulin Timur 12 December 2018   Berkala   Informasi Kinerja	Lihat
4	JENIS PELAYANAN LENGKAP DENGAN SYARAT ( KELENGKAPAN BERKAS) ... Kelurahan Landasan Ulin Timur 12 December 2018   Berkala   Program dan Kegiatan	Lihat
5	DAFTAR NAMA BESERTA KONTAK RT / RW KELURAHAN LANDASAN ULIN T... Kelurahan Landasan Ulin Timur 12 December 2018   Berkala   Laporan dan prosedur akses informasi	Lihat
6	Capaian Kinerja Kelurahan Landasan Ulin Timur Periode Triwul... Kelurahan Landasan Ulin Timur 12 December 2018   Berkala   Informasi Kinerja	Lihat

Berdasarkan data per 2 Januari 2024, jumlah informasi yang telah diupload oleh admin SIP-PPID pada unit kerja adalah sebanyak 2256 informasi, dengan rincian sbb:

<b>N o</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Jumlah Unggaha n Informasi</b>
1	BKPSDM	81
2	BAPPEDA	13
3	Dinas LH	60
4	Disdukcapil	37
5	BPKAD	1
6	BPPRD	12
7	Kesbangpol	16
8	BPBD	46
9	Dinas Perhubungan	64
10	Dinas Kesehatan	222
11	DPMPTSP	75
12	Dinas PUPR	18
13	Disporabudpar	16
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	32
15	Dinas Perumahan dan Permukiman	41
16	DKP3	84
17	Disdaldukkbpmppa	12
18	Dinas Perdagangan	142
19	Dinas Pendidikan	1
20	Dinas Sosial	39
21	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	60
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	67
23	Sekretariat DPRD	202
24	Inspektorat	27
25	Rumah Sakit Daerah Idaman	2
26	SatpolPP	93
27	Kecamatan Banjarbaru Utara	27
28	Kecamatan Banjarbaru Selatan	14
29	Kecamatan Cempaka	18
30	Kecamatan Landasan Ulin	42
31	Kecamatan Liang Anggang	22
32	Kelurahan Komet	24
33	Kelurahan Loktabat Utara	18
34	Kelurahan Mentaos	12
35	Kelurahan Sungai Ulin	45
36	Kelurahan Gt. Paikat	1

37	Kelurahan Kemuning	4
38	Kelurahan Loktabat Selatan	33
39	Kelurahan Sungai Besar	7
40	Kelurahan Gt. Payung	12
41	Kelurahan Gt. Manggis	31
42	Kelurahan Landasan Ulin Timur	26
43	Kelurahan Syamsudinnoor	6
44	Kelurahan Cempaka	25
45	Kelurahan Sungai Tiung	12
46	Kelurahan Bangkal	35
47	Kelurahan Palam	0
48	Kelurahan Landasan Ulin Utara	9
49	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	25
50	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	3
51	Kelurahan Landasan Ulin Barat	46
52	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setdako	34
53	Bagian Umum pada Setdako	7
54	Bagian Organisasi pada Setdako	36
55	Bagian Pemerintahan pada Setdako	94
56	Bagian Kesra pada Setdako	1
57	Bagian Ekonomi pada Setdako	72
58	Bagian Pembangunan pada Setdako	25
59	Bagian Hukum pada Setdako	4
60	Bagian pengadaan Barang dan Jasa pada Setdako	23
<b>TOTAL</b>		<b>2256</b>

Terlaksananya pelayanan informasi melalui aplikasi SIP-PPID tahun 2024, dapat dilihat dari banyaknya dokumen informasi yang diunduh oleh masyarakat melalui sistem maupun terpenuhinya permohonan informasi yang diminta secara langsung.

## Informasi

Klik judul informasi untuk melihat



### Informasi Terbaru

**Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru**  
SatpolPP Kota Banjarbaru

**Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru**  
SatpolPP Kota Banjarbaru

**Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru**  
SatpolPP Kota Banjarbaru

**Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru**  
SatpolPP Kota Banjarbaru

**Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru**  
SatpolPP Kota Banjarbaru

**Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru**  
SatpolPP Kota Banjarbaru



### Informasi Paling Banyak Dimohon

**Profil Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**  
Kecamatan Banjarbaru Selatan 7546 kali

**Profil KELURAHAN MENTAOS Kota Banjarbaru**  
Kelurahan Mentaos 5833 kali

**Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin Pegawai Disperkim Triwulan I 2023**  
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperki...) 2918 kali

**DAFTAR NAMA YANG BELUM REKAMAN E-KTP DIKELURAHAN**  
Kelurahan Landasan Ulin Timur 1830 kali

**NAMA KETUA RT DAN RW**  
Kelurahan Landasan Ulin Utara 1456 kali

**Profil Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**  
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru... 1285 kali



# Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

---

## 1. Kendala Teknis

- Server sering down sehingga menghambat proses penginputan dokumen informasi publik ke aplikasi SIP-PPID.
- Beberapa admin pada PPID Pelaksana masih belum paham dalam mengklasifikasikan dokumen informasi, memilah dokumen yang boleh dan tidak boleh diupload, serta dokumen yang diupload belum berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- Tidak ada proses verifikasi pada data yang diunggah admin ke aplikasi SIP-PPID.

## 2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

- Banyak masyarakat yang belum mengetahui hak mereka untuk mengakses informasi publik.
- Minimnya sosialisasi terkait prosedur permohonan informasi publik.

## 3. Kendala Regulasi

- Peraturan tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan belum diupdate secara berkala

## 4. Kendala Sumber Daya Manusia

- Admin rangkap jabatan lain di unit kerja sehingga tidak bisa maksimal
- Admin lebih memprioritaskan tugas utama di unit kerja karena tidak ada tambahan insentif
- Pergantian admin karena mutasi atau sebab lain cukup sering terjadi tanpa ada transfer informasi ke admin baru
- Tidak semua petugas memiliki pemahaman yang mendalam terkait mekanisme keterbukaan informasi publik.
- Kurangnya pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan manajemen informasi.

- Kesiapan PPID masih terbatas dan kurang memadai dalam hal penyampaian Informasi dan Dokumentasi
- Beberapa unit kerja tidak memiliki petugas front office sehingga data permintaan informasi dari masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik.
- Kurangnya fasilitas untuk pelayanan di front office pada unit kerja guna menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- Kurang koordinasi antara petugas front office dengan admin SIP-PPID sehingga pelayanan informasi banyak yang tidak terdokumentasi.
- Kurang pemahaman tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di unit kerja.
- Kurangnya koordinasi internal badan publik sehingga admin kesulitan dalam mendapatkan data yang akan diunggah ke aplikasi SIP-PPIP, khususnya informasi yang wajib diumumkan berdasarkan Perki 1 Tahun 2021.

#### **5. Kendala dalam Penyusunan dan Klasifikasi Informasi:**

- Kesulitan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **6. Resistensi atau Kurangnya Dukungan dari Pihak Internal:**

- Tidak semua pihak internal di lembaga atau instansi mendukung penuh pengelolaan informasi publik yang terbuka.
- Keengganan untuk berbagi informasi karena kekhawatiran tentang dampak negatif atau masalah hukum.

# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

---

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri sebagai penanggungjawab aplikasi SIP-PPID setiap ada kendala.
2. Mempertimbangkan penggunaan aplikasi info.id yang dikembangkan Komdigi untuk pelayanan informasi, dan sudah ada fitur verifikasi oleh atasan sebelum informasi dipublish.
3. Mengadakan pelatihan rutin bagi admin mengenai keterbukaan informasi publik, pelayanan prima, dan pengelolaan data sesuai peraturan untuk meningkatkan kompetensi SDM.
4. Membuat panduan tertulis atau video tutorial sebagai referensi praktis bagi admin
5. Memaksimalkan peran PPID Pelaksana dalam memverifikasi dokumen informasi yang akan diupload oleh admin.
6. Sosialisasi tidak hanya dilakukan untuk internal tetapi juga eksternal (masyarakat), melalui media sosial, website resmi, dan kampanye langsung ke masyarakat. Mengembangkan infografis yang mudah dipahami terkait hak masyarakat atas informasi publik dan prosedurnya. Serta program edukasi di sekolah, komunitas, dan instansi lokal tentang hak untuk mendapatkan informasi.
7. Perlu mengupdate Peraturan tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
8. Penunjukan admin yang kompeten dan berdedikasi dalam pengelolaan informasi publik dan menganggarkan insentif untuk admin.
9. Membuat panduan baku tentang pengelompokan dan dokumentasi informasi publik.
10. Mengalokasikan fasilitas dan sumber daya tambahan untuk pelayanan di front office atau memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pelayanan informasi dengan menjelaskan prosedur pelayanan informasi.



11. Memperbaiki koordinasi antara petugas front office dan admin SIP-PPID sehingga petugas front office mengetahui alur permohonan informasi. Selain itu, pada front office juga perlu disediakan buku register permohonan informasi, formulir permohonan, dan kelengkapan lainnya sesuai peraturan.
12. Mengadakan sesi diskusi dan sosialisasi internal untuk menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dan dampaknya yang positif
13. Melibatkan tim legal untuk memberikan pemahaman mengenai batasan dan perlindungan hukum dalam keterbukaan informasi publik.
14. Membuat kuisioner monitoring dan evaluasi ketersediaan dokumen informasi di unit kerja menggunakan standar yang dipakai oleh Komisi Informasi Provinsi/Pusat dalam menetapkan kategori keterbukaan informasi kabupaten/kota.
15. Melaksanakan monev secara berkala atas ketersediaan informasi dan keaktifan admin dalam mempublikasi dokumen informasi dan menetapkan kategori keterbukaan informasi unit kerja berdasarkan monev yang dilakukan.

Demikian laporan tahunan ini kami buat sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2024.

Banjarbaru, 11 Februari 2025  
Atasan PPID Kota Banjarbaru  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru,



GUSTAFYA YANDI  
Pembina Utama Madya  
NIP 196612271986021004